

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan kajian komunikasi dalam bidang jurnalistik mencakup sejarah panjang yang dimulai sejak manusia mulai mengenal tulisan. Kemunculan media massa memberikan dampak sosial yang signifikan, yang turut berperan dalam kemajuan peradaban manusia. Di Eropa dan Amerika, misalnya, dinamika sosial-politik sejalan dengan munculnya surat kabar. Di Indonesia, masa penjajahan Belanda juga mencatatkan sejarah penting dalam dunia pers, di mana VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) menerbitkan surat kabar pertama, *Bataviasche Nouvelles*, sebagai bentuk pers komersial yang pertama kali ada di wilayah Nusantara.<sup>1</sup> Pada tahun 1744, surat kabar *Bataviasche Nouvelles* lebih banyak berfokus pada topik perniagaan dan hukum Belanda, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau Melayu. Memasuki awal abad ke-20, pers di Hindia Belanda mulai beralih fokus dengan mengangkat isu-isu terkait kemajuan serta semangat persatuan. Politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda menjadi faktor pendorong bagi pesatnya perkembangan pers, yang berbarengan dengan berdirinya berbagai organisasi yang dibentuk oleh kalangan bumiputera.

Tokoh-tokoh pers yang berjuang untuk membela bangsanya, seperti yang diceritakan Pramoedya Ananta Toer dalam *Tetralogi Pulau Buru*, antara lain Tirta Adi Soerjo, Marco Kartodikromo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka terlibat dalam

---

<sup>1</sup> *Bataviasche Nouvelle* atau *Bataviase Nouvelles* adalah iklan pertama di Belanda yang terbit pada 8 Agustus 1744 sekaligus merupakan surat kabar pertama di Batavia (Jakarta), diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Bataviasche\\_Nouvelle](https://id.wikipedia.org/wiki/Bataviasche_Nouvelle), (Februari 2009), 11 Juni 2021.

pengelolaan *Medan Prijaji*, media pribumi pertama yang didirikan oleh Tirta pada tahun 1912. Menurut Takashi Shiraishi, padadekade pertama abad ke-20, terutama setelah diberlakukannya undang-undang pers yang baru, terdapat tekanan terhadap pers yang berfokus pada kebangkitan nasional. Meskipun demikian, jumlah dan peredaran media berbahasa Melayu dan daerah justru mengalami peningkatan pada tahun 1910.<sup>2</sup> Seperti halnya Tirta dan Marco, Mochtar Lubis juga memilih jalur perlawanan melalui dunia pers. Sebagai tokoh pers, Mochtar Lubis dikenal memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, yang ia sampaikan melalui karya-karyanya. Ia sering mengungkapkan pemikirannya mengenai berbagai kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang politik, melalui tulisan-tulisannya. Salah satu media yang menjadi wadah bagi pandangan-pandangan tersebut adalah *Indonesia Raya*, sebuah surat kabar yang dianggap dekat dengan Partai Sosialis Indonesia dan Angkatan Darat.<sup>3</sup>

Mochtar Lubis bukanlah seorang politisi partai, makelar kekuasaan, atau penganut ideologi tertentu. Ia juga bukan seorang akademisi atau sarjana. Namun, sebagai seorang perantara budaya yang mahir, ia dikenal sebagai pengarang pemenang penghargaan dan wartawan terkenal di tingkat internasional. Dalam arti yang lebih luas, ia adalah seorang budayawan. Mochtar Lubis menjadi salah satu juru bicara yang paling berpengaruh di negaranya, dan berhasil mempertahankan ketenaran publiknya hampir sepanjang hidup dewasanya.<sup>4</sup> Mochtar Lubis lahir di

---

<sup>2</sup> Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Cet II, Jakarta, Kreatama, 2005) hlm. 42.

<sup>3</sup> Ignatius Haryanto, 2006, *Harian Indonesia Raya, Sebuah Pers Pembangkang* (Cetakan pertama: LKIS Yogyakarta), hlm. 3.

<sup>4</sup> David T. Hill, *Jurnalisme dan Politik di Indonesia* (Cet 1, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) hlm, 4.

Padang, Sumatera Barat, pada 7 Maret 1922, dalam keluarga Batak Mandailing, dan meninggal dunia di Jakarta pada 2 Juli 2004. Ayahnya, Marah Husin, yang bergelar Raja Pandapotan Lubis, bekerja sebagai kepala Distrik Kerinci pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sementara ibunya bernama Siti Madinah Nasution. Mochtar Lubis adalah anak keenam dari sepuluh bersaudara dalam keluarga yang menganut agama Islam.<sup>5</sup>

Kutipan tersebut mengindikasikan anggapan bahwa *Indonesia Raya* adalah surat kabar yang mendukung Pemerintahan Orde Lama, mengingat nama surat kabar ini diberikan oleh Teuku Syahrir, adik Sutan Syahrir. Pada masa-masa awal penerbitannya, sebagian besar biaya percetakannya juga berasal dari angkatan darat. Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Mochtar Lubis dalam tajuk rencana pada edisi perdana *Indonesia Raya*. Dalam tajuk tersebut, ia menyatakan:

“Pada dasarnya *Indonesia Raya* berdiri di luar segala partai-partai atau aliran-aliran politik. Bagi kami, terutama sekali kebenaran dan objektivitas akan terus menjadi obor dan pegangan dalam usaha. Kami akan menghindarkan diri dari politik pemberitaan yang berat sebelah, yang menguntungkan satu golongan dan merugikan golongan lain (kepentingan umum)”<sup>6</sup>

Pada periode kedua, *Indonesia Raya* juga dianggap sebagai pers yang sangat mendukung rezim Soeharto. Hal ini disebabkan oleh pandangan Mochtar Lubis yang pada awalnya menganggap bahwa rezim Soeharto telah memberikan kebebasan pers yang telah lama diinginkan. Pandangan tersebut dipaparkan oleh Mochtar Lubis dalam tajuk rencana pada edisi perdana *Indonesia Raya* di periode kedua penerbitannya.

---

<sup>5</sup> Badan pembinaan pengembangan dan pembinaan Bahasa, 2022, *Mochtar Lubis*, (1922-2004), Ensiklopedia Sastra Indonesia, di akses dari ensiklopedia.kemdikbud.go.id, pada Kamis 23 juni 2022, pukul 11:45 WIT.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 52.

“Harian ini memberikan dukungan pada pemerintahan Soeharto dan akan memberikan sumbangan sebesar mungkin dalam menciptakan iklim yang sehat dan konstruktif di negeri kita agar program-program pembangunan ekonominya untuk kemakmuran rakyat yang merata dan adil mendapat sukses sebesar mungkin...”<sup>7</sup> Ditambah lagi tajuk ini dibagian bawahnya ditandatangani langsung oleh sang pimpinan redaksi, suatu hal diluar kebiasaan.

Namun, dukungan *Indonesia Raya* terhadap rezim Soeharto tidak bertahan lama. Setelah koran ini mengetahui adanya praktik-praktik tidak wajar dalam kemenangan Golkar pada Pemilu 1971, sikap surat kabar ini pun berbalik arah. Mochtar Lubis menyatakan, "akhir bulan madunya dengan Orde Baru," seperti yang tertulis dalam bukunya *Pers di Masa Orde Baru*.

Sikap Mochtar Lubis dan harian *Indonesia Raya* tersebut dapat dikatakan selaras dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku *Sembilan Elemen Jurnalisme* yang diterjemahkan oleh Andreas Harsono. Buku ini membahas apa yang seharusnya dilakukan oleh wartawan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari *jurnalisme*. Lewat surat kabar *Indonesia Raya*, Mochtar Lubis dikenal sebagai “wartawan jihad” karena dianggap mampu mengorbankan apapun demi menyampaikan kebenaran, bahkan hingga harus menghadapi pembredelan dan penahanan. Soekarno sendiri pernah menyatakan, “Saya dengan tegas menyatakan bahwa dalam suatu revolusi tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang mendukung revolusi yang dibolehkan hidup”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ignatius Haryanto, 2006, *Harian Indonesia Raya, Sebuah Pers Pembangkang*, hlm. 67.

<sup>8</sup> Ignatius Haryanto, 2006, *Harian Indonesia Raya, Sebuah Pers Pembangkang* (Cetakan pertama: LKIS Yogyakarta), hlm. 9.

Pembredelan surat kabar terjadi berulang kali pada masa Orde Lama dan Orde Baru dengan alasan mengganggu keamanan dan memicu kerusuhan di Indonesia. Pada masa rezim Soekarno, surat kabar seperti *Indonesia Raya*, *Pedoman*, dan *Merdeka* menjadi korban pembredelan. Sementara itu, pada masa rezim Soeharto, puluhan surat kabar, termasuk *Indonesia Raya*, *Tempo*, *Detik*, *Harian Rakyat*, *Jakarta Times*, dan banyak lainnya, turut dibredel. Meskipun pers bisa dibredel kapan saja, pers yang bebas dan berani akan terus muncul untuk menentang segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh para penguasa.<sup>9</sup> Mochtar Lubis, seperti yang dikatakan oleh David T. Hill, merupakan seorang pembangkang. Ia adalah sosok yang dengan tegas menentang segala gagasan atau kebijakan yang ia anggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>10</sup>

Dalam sejarah pers Indonesia, harian *Indonesia Raya* dapat dianggap sebagai surat kabar yang sangat unik. Surat kabar ini dibredel dua kali dan hidup dalam dua periode yang dipisahkan oleh masa vakum yang cukup panjang, yaitu antara 1949-1958 dan 1968-1974. Namun, tujuan Ignatius Haryanto menulis buku ini bukan hanya untuk mencatat sejarah tersebut. Karakteristik *Indonesia Raya* yang tajam dalam mengkritik pemerintahan otoriter yang sering kali membuat kebijakan kontroversial juga menjadi fokus utama dalam buku ini. Pembaca dapat melihat perkembangan pers di Indonesia sebelum era reformasi, serta bagaimana

---

<sup>9</sup> Reza Egis, April 2018, *Harian Indonesia Raya, Sebuah Pers Pembangkang*: LKIS Yogyakarta, Diakses dari [Harian Indonesia Raya, Sebuah Pers Pembangkang | Ekspresionline.com](http://Harian Indonesia Raya, Sebuah Pers Pembangkang | Ekspresionline.com), Jumat 28 Agustus 2022, pukul 1.47 WIT.

<sup>10</sup> Irfan Teguh, Juli 2019, *Mochtar Lubis: Pembangkang Dua Rezim yang Tak Gentar Berpolemik*: Rubrik Humaniora, diakses dari [Mochtar Lubis: Pembangkang Dua Rezim yang Tak Gentar Berpolemik \(tirto.id\)](http://Mochtar Lubis: Pembangkang Dua Rezim yang Tak Gentar Berpolemik (tirto.id)), pukul 1.38 WIT.

dua rezim yang dihadapi oleh seorang jurnalis hebat, Mochtar Lubis, mempengaruhi dunia pers di tanah air.

Pada masa itu, pers belum dapat menikmati kebebasannya karena tertekan dan terbelenggu oleh berbagai aturan yang ada. Salah satunya adalah adanya Surat Izin Terbit (SIT) yang diberlakukan melalui Penetapan Presiden No. 6/1963 pasal 6. Aturan ini menegaskan bahwa setiap surat kabar harian dan majalah wajib memperoleh izin terbit dari pemerintah, dan percetakan tidak diperbolehkan mencetak media jika tidak mendapatkan izin tersebut.

Selain SIT, terdapat pula ketentuan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Kopkamtib) sejak pecahnya Gerakan 30 September 1965. Ketika kebebasan politik, agama, dan ekonomi mulai berkembang bersamaan dengan tumbuhnya pencerahan, muncul pula tuntutan untuk kebebasan pers. Dalam konteks inilah lahir teori yang dikenal dengan *Libertarian Theory* atau Teori Pers Bebas, yang mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang mampu membedakan yang benar dan yang salah. Pers harus berfungsi sebagai mitra dalam pencarian kebenaran, bukan sebagai alat pemerintah. Oleh karena itu, tuntutan agar pers mengawasi pemerintah berkembang berdasarkan prinsip-prinsip dari teori ini.<sup>11</sup>

Setelah diterapkannya SIC, pers pada waktu itu harus melalui dua tahap sebelum diizinkan menyebarkan surat kabarnya. Pertama, pers harus mendapatkan bukti SIC, kemudian baru bisa mengajukan Surat Izin Terbit (SIT). Hanya setelah

---

<sup>11</sup> Prof. Muhammad Budyatna, *Jurnalistik Teori & Praktik*, (Cet 7, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Maret 2016) hlm. 20.

kedua izin tersebut diperoleh, surat kabar dapat disebarakan ke masyarakat. Mochtar Lubis, sebagai tokoh pers, dikenal sangat terbuka dalam mengungkapkan pandangannya terhadap kebijakan politik yang diterapkan pemerintah Indonesia pada periode 1968-1974. Ia percaya bahwa kebijakan pemerintah yang berdampak besar pada rakyat perlu diperbaiki agar dapat membawa perubahan yang lebih baik. Pandangan kritis yang terbuka ini mempengaruhi hubungannya dengan pemerintah yang berkuasa, yang akhirnya berujung pada pembredelan surat kabar *Indonesia Raya* pada periode tersebut.

Sikap kritis Mochtar Lubis dan *Indonesia Raya* dalam mengungkapkan berbagai masalah sosial dan politik menyebabkan surat kabar ini beberapa kali dibredel. Seperti yang ditulis oleh Mansyur Sema, "Pembredelan *Indonesia Raya* terjadi karena keberaniannya membeberkan kasus pelecehan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, penindasan di masyarakat, dan lain sebagainya." Keberanian ini menunjukkan komitmen *Indonesia Raya* untuk mengungkap kebenaran meskipun menghadapi risiko besar.<sup>12</sup> Kontroversi terus berlanjut, hingga pada 2 Juli 2004, Mochtar Lubis meninggal dunia di Jakarta pada usia 82 tahun. Berbagai perjuangan dan kontribusinya mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam dari sudut pandang sejarah. **"Kebebasan Pers dalam Pandangan Mochtar Lubis"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat dan menjadi masalah pokok adalah:

---

<sup>12</sup> Mansyur Semma, 2008, *Dalam Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*: Yayasan Obor Indonesia.

1. Bagaimana perkembangan kebebasan pers di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan Mochtar Lubis terhadap kebebasan Pers di Indonesia?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan kedua rumusan masalah yang diangkat, bahwa peneliti akan membatasi masalah dengan menarik benang merah, yakni:

1. Menjelaskan perkembangan kebebasan pers di Indonesia.
2. Menjelaskan pandangan Mochtar Lubis terhadap kebebasan pers di Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada batasan dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perkembangan kebebasan pers di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan Mochtar Lubis terhadap kebebasan pers di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan civitas akademika sebagai referensi sekaligus bisa dijadikan bahan belajar di Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

#### **b. Manfaat Praktis**

kajian ini diharapkan dapat menambah literatur, bacaan untuk memperkaya khazanah pengetahuan khususnya mahasiswa Jurnalistik, praktisi media, dalam sejarah dunia persuratkabaran. Dan juga bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat.

